

SEKTOR UMKM DI INDONESIA: Profil , Masalah, Dan Strategi Pemberdayaan

Idris Yanto Niode
E-Mail: Idris_Niode @ Yahoo.co.id

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Negeri Gorontalo

Abstrac

Komitmen yang kuat dari pemerintah telah mendorong perkembangan dari UMKM, demikian juga halnya bahwa UMKM memiliki prospek yang baik untuk lebih diberdayakan. Kepentingan tersebut terkait dengan kondisi perekonomian nasional yang sekarang dan beberapa tahun kurang meyakinkan. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masalah yang harus dihadapi oleh UMKM itu sendiri diantaranya dapat diklasifikasikan dalam dua permasalahan utama yakni masalah finansial dan nonfinansial (organisasi manajemen).

Dengan optimisme bahwa pertumbuhan peran UMKM, serta potensi-potensi yang sebetulnya dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program-program yang jelas untuk mencapainya. Untuk tujuan tersebut yang diperlukan adalah dukungan dari Pemerintah, dan dari stakeholder lainnya seperti Bank Indonesia, Perbankan, lembaga keuangan non bank, dan dunia usaha.

Tulisan ini berusaha memaparkan bagaimana perkembangan dan permasalahan/tantangan yang dihadapi UMKM yang ada di Indonesia serta beberapa pemikiran strategi dalam rangka memberdayakan sektor ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Mengapa Sektor UMKM Perlu dikembangkan ?

Di Indonesia posisi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting, karena berbagai peranannya yang riil dalam perekonomian. Mulai dari Sharenya dalam pembentukan PDB sekitar 63,58%, kemampuannya menyerap tenaga kerja sebesar 99,45% atau sangat besarnya jumlah unit usaha yang terlibat yakni sekitar 99,84% dari seluruh unit usaha yang ada, sehingga pada sharenya yang cukup signifikan dalam jumlah nilai ekspor total, yang mencapai 18,72%.

Disamping itu keberadaan dari UMKM itu sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dimana melalui pemberdayaan UMKM yang

telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami bangsa Indonesia. Meskipun kita sadari bersama bahwa UMKM kurang mendapatkan perhatian di Indonesia sebelum krisis pecah pada tahun 1997. Namun demikian, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia (yang telah meruntuhkan banyak usaha besar) sebagian besar UKM tetap bertahan, bahkan jumlahnya meningkat dengan pesat, perhatian pada UMKM menjadi lebih besar, kuatnya UMKM juga didukung oleh struktur permodalannya yang lebih banyak tergantung pada modal sendiri (73%), 4% bank swasta, 11% bank pemerintah, dan 3% pemasok¹. Demikian juga berdasarkan data dari Biro Statistik (BPS) kemampuannya menyerap tenaga kerja juga semakin meningkat dari sekitar 12 juta pada tahun 1980, tahun 1990, dan tahun 1993 angka ini meningkat menjadi sekitar 45 juta dan 71 juta, dan pada tahun 2001 menjadi 74,5 juta. Jumlah UMKM yang meningkat dengan pesat, dari sekitar 7 ribu pada tahun 1980 menjadi sekitar 40 juta pada tahun 2001. Sementara itu total volume usaha, usaha kecil dengan modal dibawah Rp. 1 miliar yang merupakan 99,85% dari total unit usaha, mampu menyerap 88,59% dari total tenaga kerja pada tahun yang sama. Demikian juga usaha skala menengah (0,14% dari total usaha) dengan nilai modal antara 1 miliar sampai Rp 50 miliar hanya mampu menyerap 10,83% tenaga kerja. Sedangkan usaha skala besar (0,01%) dengan total diatas Rp. 54 miliar hanya mampu menyerap 0,56% tenaga kerja.

Dari data tersebut perkembangan UMKM dapat dikatakan cukup baik dan masih memiliki prospek yang baik untuk ditingkatkan, mengingat proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN berlangsung lambat, padahal permintaan barang dan jasa yang selama ini dipenuhi sektor korporat terus meningkat, sehingga memberikan peluang usaha bagi UMKM dalam berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan dan peran UMKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah saat ini, iklim investasi dan keagairahan usaha dalam perekonomian nasional, termasuk UMKM akan jauh lebih baik.

¹ Lihat Pramiyanti. *Studi Kelayakan Bisnis Untuk UKM*. Cetakan 1 (yogyakarta: Media Pressindo, 2008) hlm. 3

Melihat sumbangan pada perekonomian yang semakin penting, UMKM seharusnya mendapat perhatian yang semakin besar dari para pengambil kebijakan. Khususnya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perkembangan UMKM. Pengembangan UMKM di Indonesia selama ini dilakukan oleh Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kementerian Negara KUKM). Selain Menteri Negara KUKM, instansi yang lain seperti Depperindag, Depkeu, dan BI juga melaksanakan fungsi pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dengan menyusun Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil menengah. Demikian juga Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu) No. 316/KMK.016/1994 mewajibkan BUMN untuk menyisihkan 1 – 5% laba perusahaan bagi pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK). Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan dahulu mengeluarkan peraturan mengenai kreditt bank untuk UMKM, meskipun akhir-akhir ini tidak ada kebijakan khusus terhadap perbankan mengenai pemberian kredit ke usaha kecil lagi. Demikian juga kantor ataupun instansi lainnya yang terlibat dalam "bisnis" UMKM juga banyak.

Tantangan dan Masalah Pengembangan Sektor UMKM.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan *out-put*. Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal.

Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM membuat kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Hal ini dapat dilihat meski banyak yang terlibat dalam pengembangan UMKM, namun tugas pengembangan UMKM yang dilimpahkan kepada instansi-instansi tersebut diwarnai isu negatif misalnya politisasi terhadap KUKM, serta pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah. Demikian juga BUMN untuk menyisihkan labanya 1 -5% juga tidak dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kredit perbankan juga sulit untuk

diakses oleh UMKM, diantaranya adalah karena prosedur yang rumit serta banyaknya UMKM yang belum *bankable*².

Selain permasalahan diatas, secara umum UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan nonfinansial (organisasi manajemen).

Menurut Urata (Dalam pramiyanti: 2008) masalah finansial diantaranya adalah

- Kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM
- Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM
- Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikururkan kecil.
- Kurangnya akses kesumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketiadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
- Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
- Banyaknya UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non finansial) diantaranya adalah :

- Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksidan *quality control* yang disebabkan minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
- Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM

² *Ibid. hal.5*

- Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Selanjutnya menurut Subanar (2001:8) , berbagai kendala yang menyebabkan kelemahan serta hambatan bagi pengelolaan suatu usaha kecil diantaranya menyangkut faktor intern dari usaha kecil di antaranya masih menyangkut faktor intern dari usaha kecil itu sendiri serta beberapa faktor ekstern, seperti:

- a. Umumnya pengelola small-business merasa tidak memerlukan ataupun tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar, analisis perputaran uang tunia/kas, serta berbagai penelitian lain yang diperlukan suatu aktivitas bisnis.
- b. Tidak memiliki perencanaan sistem jangka panjang, sistem akuntansi yang memadai, anggaran kebutuhan modal, struktur organisasi dan pendelegasian wewenang, serta alat-alat kegiatan manajerial lainnya (perencanaan pelaksanaan serta pengendalian usaha) yang umumnya diperlukan oleh suatu perusahaan bisnis yang profit oriented.
- c. Kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada instuisi dan ambisi pengelola, lemah dalam promosi.
- d. Kurangnya petunjuk pelaksanaan teknis operasional kegiatan dan pengawasan mutu hasil kerja dan produk, serta sering tidak konsisten dengan ketentuan order/pesanan, yang mengakibatkan klaim atau produk yang ditolak.
- e. Tingginya labour turn-over (PHK)
- f. Terlalu banyak biaya-biaya yang di luar pengendalian serta utang yang tidak bermanfaat, juga tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan pembukuan standar.
- g. Pembagian kerja tidak proposional, sering terjadi pengelola memiliki pekerjaan yang melimpah atau karyawan yang bekerja di luar batas jam kerja standar.
- h. Kesulitan modal kerja atau tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja, sebagai akibat tidak adanya perencanaan kas.
- i. Persediaan yang terlalu banyak, khususnya jenis barang-barang yang salah.
- j. Lain-lain yang menyangkut mist-manajemen dan ketidakpedulian pengelola terhadap prinsip-prinsip manajerial.
- k. Risiko dan utang-utang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik.
- l. Perkembangan usaha tergantung pada pengusaha yang setiap waktu dapat berhalangan karena sakit atau meninggal.

- m. Sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik.
- n. Perencanaan dan program pengendalian tidak ada atau belum pernah merumuskannya.

Disisi lain berbagai tantangan dan kendala dalam pengembangan usaha kecil menengah sebagaimana dikemukakan oleh Thoha dalam bukunya “*Indonesia Menapak Abad 21*” (2000:166-167) antara lain :

- a. Belum adanya formulasi atau model atau pendekatan yang jitu tentang keberpihakan pemerintah pada ekonomi rakyat, terutama usaha kecil.
- b. Program pemberdayaan tidak atau kurang dibarengi dengan tenaga pendamping yang profesional.
- c. Program-program pemberdayaan lebih banyak berorientasi proyek, bukan pada hasil atau kinerja.
- d. Jumlah dan kualitas SDM pembina kurang memadai dibandingkan dengan lingkup pekerjaan atau tugas dan permasalahan ekonomi rakyat yang menjadi binaannya.
- e. Program-program pemberdayaan lebih banyak bersifat politis, populis dan charitas, bukan model yang sungguh-sungguh dan solid berdasarkan hasil penelitian yang panjang dan teruji.
- f. Dana, sarana dan prasarana pendukung operasional terutama bagi petugas lapangan seringkali sangat tidak memadai.
- g. Kurang terkoordinasinya pelaksanaan program-program pemberdayaan daerah.
- h. Masih lemahnya lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan pendukung usaha kecil seperti modal ventura, inkubator bisnis, leasing, dan institusi kemitraan usaha lainnya.
- i. Terbatasnya lahan pada lokasi-lokasi strategis untuk menjalankan kegiatan usaha.

Model Pengembangan dan Strategi Pemberdayaan Yang Tepat

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) barangkali merupakan salah satu andalan utama bagi ketahanan ekonomi sebuah negara. Terbukti dimasa krisis dengan bertumbuhannya banyak usaha konglomerasi yang dililit hutang luar negeri, usaha kecil menengah terutama yang berorientasi ekspor justru meraup keuntungan yang luar biasa. Sebagian lagi survive dengan berbagai cara karena kecilnya investasi dan modal yang berputar.

Akan tetapi masih banyaknya masalah yang dihadapi oleh pihak UMKM dalam rangka mengembangkan usahanya perlu mendapatkan perhatian khusus bukan hanya dari pihak pemerintah saja. Dengan kata lain bahwa persoalan kurang berkembangnya dan terperhatikannya sektor ekonomi UMKM tersebut kiranya jangan hanya ditumpukan pada tanggung jawab salah satu lembaga ekonomi saja, misalnya hanya pada sektor perbankan dalam kaitannya dengan permasalahan pendanaan. Jadi seharusnya ditumpukan dan menjadi tanggung jawab dari seluruh lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Oleh karena itu hal yang penting untuk dibahas adalah bagaimana seharusnya peran yang dimainkan oleh lembaga-lembaga ekonomi tersebut dalam memberdayakan atau membangun sektor ekonomi UMKM tersebut.

Pertama, mungkin dapat dipahami bahwa sebenarnya lembaga yang paling bertanggung jawab adalah untuk mengembangkan sektor ekonomi UMKM adalah pemerintah. Karena secara "*de facto* dan *de jure*", pemerintahlah yang seharusnya terlebih dulu menunjukkan "*political will* dan *political action-nya*" secara konkrit dalam komitmennya untuk berpihak secara nyata kesektor UMKM. Dimana hal tersebut seharusnya sudah tertuang dalam "*blue print*" kebijaksanaan pembangunan diwilayahnya masing-masing³.

Dalam hal ini pemerintah daerah misalnya, harus mampu berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator, koordinator ataupun regulator demi untuk merealisasikan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada UMKM. Diantaranya, pemerintah melalui dinas-dinasnya dibawah koordinasi BAPPEDA harus mampu menyusun dan menerbitkan "*land scape*" atau peta potensi sektor ekonomi UMKM ini secara jelas dalam berbagai aspeknya, yang nantinya dapat dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga lainnya untuk mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan secara tepat.

Kedua, dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga dunia usaha, baik pengusaha UMKK maupun pengusaha besar, mereka selalu harus berupaya secara mandiri dan sukarela untuk melakukan langkah-langkah strategis dan realistis dalam berusaha. Diantaranya bagi pengusaha UMKK, mereka harus selalu berupaya meningkatkan ketrampilan atau pengetahuan berusahanya, baik dibidang produksi, manajemen maupun

³ Marsuki. *Pemikiran Dan Strategi Memberdayakan Sektor ekonomi UMKM Di Indonesia*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2006) hlm. 21

pemasarannya. Atau melakukan aliansi usaha secara profesional baik dengan pengusaha sektor UMKM, maupun dengan sektor-sektor usaha lainnya, dalam bidang-bidang yang telah disebutkan. Kemudian mereka harus selalu berusaha dapat memenuhi syarat-syarat minimal agar dapat akses lembaga-lembaga perbankan⁴

Sedangkan bagi pengusaha besar didaerah, kiranya mereka berusaha menyertakan sektor ekonomi UMKM sebagai partner berusaha secara fungsional atas dasar saling menguntungkan. Serta kiranya pengusaha besar tersebut berusaha melakukan investasi berkenaan dengan pemberdayaan sektor atau potensi sumber daya lokal unggulan utamanya dalam industri pengolahan dengan melibatkan sektor UMKM. Atau kiranya para pengusaha besar dapat berperan sebagai penjamin pendanaan pada sektor perbankan, oleh karena adanya keterkaitan kegiatan atau usaha diantara mereka.

Ketiga, dalam kaitannya dengan lembaga keuangan dan perbankan. Kiranya dengan adanya UU otonomi daerah maka sektor perbankan yang ada didaerah dapat melakukan beberpa penyesuaian kebijaksanaan baik dari kepentingan Bank Indonesia agar dapat mengakomodasi semangat UU Otonomi Daerah agar dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan ketiga alasan diatas sebetulnya pemerintah saat ini telah menjalankan strategi pemberdayaan UMKM tersebut yang dapat diklasifikasikan kedalam:

1. Aspek manajerial yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omset/ tingkat utilitas/ tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Aspek permodalan yang meliputi: bantuan moral (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit mini/ Midi, KCU)
3. Mengembangkan program kemitraan dengan perusahaan besar, baik melalui sistem Bapak-Anak Angkat. PIR, keterkaitan hulu-hilir (*Forward linkage*), kerekaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal ventura ataupun subkontrak.

4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil), yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri)
5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan)

Penutup

Peran pemerintah dalam pembangunan tidak terlepas begitu saja dengan pemberdayaan. Usaha kecil menengah atau lebih dikenal dengan UMKM telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang besar khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu besarnya kontribusinya bagi pembangunan membuat pemerintah mau tidak mau harus turut membantu dalam upaya memberdayakannya bukan malah memperdayakan.

Akhirnya, uraian diatas pada dasarnya dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa merealisasikan strategi pembangunan melalui pemberdayaan sektor ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai sesuatu yang hal yang dapat menjadi sulit tapi juga dapat menjadi sesuatu yang mudah, hal tersebut hanya ditentukan oleh kesamaan atau perbedaan pandangan kita terhadap masalah yang dihadapi. Jika kita sepakat bahwa tanggung jawab terhadap pencapaian cita-cita untuk merealisasikan strategi pembangunan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, maka hal tersebut mungkin akan menjadi sesuatu yang mudah.

Daftar Pustaka

- Lestari, Sri.** 2006. *Perkembangan Dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM. Jakarta
- Marsuki.**2006. *Pemikiran Dan Strategi Memberdayakan Sektor ekonomi UMKM Di Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- ,1999. *Strategi Pembangunan Agribisnis Dalam Kondisi Krisis Ekonomi dan Moneter*. (Bahan ceramah Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis Unhas ke 43, tgl 8 September 1999) Kampus Unhas. Ujung Pandang
- Pramiyanti, Alila.** *Studi Kelayakan Bisnis Untuk UKM*. Cetakan 1. Media Pressindo Yogyakarta
- Raharjo, M. Dawam.** 1986. *Transformasi Pertanian, Industri dan Kesempatan Kerja*. Jakarta. Universitas Indonesia
- Subanar, Harimurti,** 2001. *Manajemen Usaha Kecil*. BPFE, Yogyakarta
- Thoha, Mahmud,** 2000. *Indonesia Menapak Abad 21 : Kajian Ekonomi Politik*. Millenium Publisher, Jakarta.
- Yoety. Oka.** 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Karya Unipress.
- Info Bank- Majalah TEMPO. Edisi 12 – 18 2008. *BRI Bukukan Laba Terbesar dengan Fokus Pada Kredit UMKM*.